



KETERBUKAAN PEMERINTAH DI TINGKAT DESA: STUDI TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DESA PEJAMBON KABUPATEN BOJONEGORO

Kusnan

ABSTRACT

This study aims to see all the efforts of the Pejambon Village government in transparency of public information. Pejambon Village has many achievements in the field of open government. This study used the descriptive qualitative method. The results were (1) efforts made to increase community participation, including the Village Musrenbang, Public Discussion, SMS Center, and WhatsApp Groups, (2) the transparency of the Pejambon Village government was classified as useful because it had published various public information, (3) the accountability of the Pejambon Village government that stands out is the accountability report for the APBDes which is published online through the website and billboards. The success of the Pejambon Village government needs to be replicated by other village governments to realize public information disclosure.

Keywords: *Open Government, Transparency of Public Information, Village*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat upaya Pemerintah Desa Pejambon dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. Desa Pejambon memiliki banyak prestasi di bidang keterbukaan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasilnya adalah (1) upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, antara lain Musrenbang Desa, Diskusi Publik, SMS Center, dan WhatsApp Groups, (2) keterbukaan pemerintah Desa Pejambon tergolong sukses karena telah menerbitkan berbagai informasi publik, (3) pertanggungjawaban pemerintah Desa Pejambon yang menonjol adalah laporan pertanggungjawaban APBDes yang dipublikasikan secara online melalui website dan baliho. Keberhasilan Pemerintah Desa Pejambon perlu direplikasi oleh pemerintah desa lain untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik.

Kata Kunci: *Pemerintahan Terbuka, Keterbukaan Informasi Publik, Desa*

Submitted : 13-03-2021
Revised : 11-04-2021
Inisiated Publish : 24-04-2021

AFFILIATION:

Program Studi Administrasi Publik,
Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya

Co-Responding E-mail:

kusnan@untag-sby.ac.id

Diterbitkan oleh:



Pusat Kajian Administrasi Publik
Program Studi Administrasi Publik
Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur

berkolaborasi dengan



Indonesia Association of Public
Administration Jawa Timur

PENDAHULUAN

Pemerintahan Presiden Joko Widodo memiliki cita-cita membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa (nasional.kompas.com). Desa sebagai pemerintahan terkecil yang tentunya dekat dengan masyarakat mempunyai peran penting untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa serta mutu hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan fasilitas serta prasarana, pengembangan kemampuan ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam. Sehingga hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dinilai tepat untuk mewujudkan pembangunan tersebut dengan mengedepankan partisipatif, keterbukaan, tertib kepentingan universal, serta akuntabilitas.

Salah satu pemerintah daerah yang mempunyai komitmen kuat melaksanakan pembangunan Indonesia melalui desa adalah Kabupaten Bojonegoro. Prestasi dari kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur tersebut memang tidak perlu diragukan lagi. Pada 2016, Kabupaten Bojonegoro berhasil terpilih sebagai percontohan pemerintah yang terbuka pada tingkat dunia. Pada tahap seleksinya, program ini diikuti oleh 69 negara yang berasal dari benua Amerika, Afrika, Eropa, dan Asia (Diskominfo Kabupaten Bojonegoro, 2016).

Sebagai daerah terpilih Kabupaten Bojonegoro melalui Rencana Aksi Daerah (RAD) tahun 2016-2017, berkomitmen untuk melakukan penguatan akuntabilitas pemerintahan desa. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) ditunjuk sebagai koordinator dan bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo), Bagian Pemerintahan, Camat, Kepala Desa, dan perwakilan dari NGO, yaitu Bojonegoro Institute (BI), *Institute Development of Society* (IDFoS) Indonesia. Adapun target keberhasilan RAD tahun 2016 adalah (1) terpublikasikannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan laporan pertanggungjawaban berbasis keterbukaan informasi publik melalui baliho, dan (2) tersusunnya indeks keterbukaan pemerintahan desa. Selanjutnya, RAD tahun 2017 adalah (1) terpublikasikannya APBDes, laporan pertanggungjawaban pemerintahan desa berbasis keterbukaan informasi publik melalui baliho (100%), website desa (70%), (2) terpublikasikannya aset desa melalui baliho (10%), (3) terlaksanakannya penguatan kapasitas masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pemerintahan desa pada 30 desa, dan (3) terlaksanakannya pendampingan pembentukan desk layanan informasi desa/Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa (PPID Desa) pada 30 Desa (Bappenas & OGI, 2016).

Terlihat bahwa implementasi keterbukaan informasi publik ditingkat desa dilakukan dengan cara konvensional (baliho) dan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

seperti website. Dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 disebutkan bahwa menyediakan website dalam pemerintahan adalah tahap pertama penerapan *electronic government* di Indonesia. Kemudian dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Informasi Desa diharapkan dapat dijadikan pedoman sehingga mempercepat pelaksanaan keterbukaan informasi publik berbasis website. Meskipun belum semua desa di Kabupaten Bojonegoro memiliki website, langkah ini sudah menunjukkan komitmen yang baik. Terdapat 62 website desa pada 2014, kemudian bertambah 25 website desa pada tahun 2015. Sementara, 25 desa sedang melakukan proses pengajuan domain pada 2016 (beritabojonegoro.com). Implementasi keterbukaan informasi publik berbasis website merupakan pilihan yang tepat karena website mampu memberikan berbagai informasi (seperti teks, gambar, suara, dan video). Informasi tersebut tidak membutuhkan tempat fisik karena tersimpan pada server (Simarmata, 2010). Selain itu, website merupakan perangkat yang strategis saat ini dalam pemerintahan. Melalui website, informasi dapat tersampaikan kepada masyarakat secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan internet (Wiratmo, *et al.*, 2017).

Implementasi keterbukaan informasi publik yang dilakukan dengan cara konvensional maupun berbasis TIK dinilai efektif sebagai kontrol bagi pemerintah desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, contohnya pengelolaan Dana Desa. Dengan adanya UU Desa, pemerintah desa memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola keuangan. Sejak pertama kali dana desa digulirkan pada 2015 hingga 2020, jumlahnya selalu meningkat (lokadata.beritagar.id). Tingginya anggaran Dana Desa yang diterima pemerintah desa jika tidak dikelola dengan transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat maka akan berpotensi adanya penyimpangan, contohnya korupsi. Sejak tahun 2015-2019, sejumlah 473 kepala desa harus berurusan dengan penegak hukum akibat penyalahgunaan dana desa. Sedangkan sebanyak 192 kasus masih dalam proses persidangan di pengadilan. Hal ini menandakan bahwa setiap tahapan pengelolaan Dana Desa rawan adanya penyimpangan prosedural, korupsi, atau yang lainnya (mediaindonesia.com). Banyaknya kasus penyimpangan dana desa dapat disebabkan oleh penerapan sistem pengendalian internal yang belum dilaksanakan secara menyeluruh masih lemah (Handiyono & Lutfi, 2020). Selain itu, juga disebabkan oleh masih banyak desa yang tertutup, contohnya saja di Kabupaten Bojonegoro hanya ada 1 pemerintah desa yang berkategori terbuka di pada tahun 2016. Sementara pada tahun 2017, sebanyak 3 pemerintah desa menuju terbuka dan 10 pemerintah desa masuk kategori kurang terbuka. Penelitian tersebut dilakukan IDFoS Indonesia pada 42 pemerintah desa (idfos.or.id). Tingginya jumlah pemerintah desa yang tertutup juga diperlihatkan dari kepemilikan website yang masih rendah. Pada 2016, pemerintah

desa/kelurahan di Kabupaten Bojonegoro yang memiliki website sejumlah 105 dari 430 desa/kelurahan. Sedangkan pemerintah desa yang belum memiliki website sebanyak 365 (beritabojonegoro.com). Hal ini menandakan bahwa pemerintah desa yang memiliki website adalah 24,4% dan 75,5% belum memiliki website.

Jika banyak kepala desa tersandung kasus hukum, lain ceritanya dengan Pemerintah Desa Pejambon. Desa yang terletak di Kecamatan Sumberrejo tersebut berhasil melaksanakan keterbukaan informasi publik sehingga layak menyandang predikat desa terbuka. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya prestasi telah yang diraih oleh Pemerintah Desa Pajambon, di tingkat Kabupaten Bojonegoro antara lain juara 1 lomba Desa *Open Government* (2016), juara 1 kategori pengelolaan dana desa (2017), dan pelopor desa terbuka (2017) (pejambon-bjn.desa.id). Prestasi lainnya adalah dua kali menjadi juara 1 kategori website dalam ajang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Awards 2017 dan 2018 di Jawa Timur (kip.jatimprov.go.id). Kemudian juara 1 desa Terinformatif dan Transparan Tingkat Nasional tahun 2018 (kanalbojonegoro.com).

Atas berbagai prestasi yang diraih oleh Pemerintah Desa Pejambon menjadi landasan bagi *World Bank* untuk memberikan dana hibah sebesar Rp1,5 M kepada desa yang dipimpin Abd Rokhman tersebut melalui Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk mengembangkan program pembangunan desa (jatim.antaranews.com). Dana hibah digunakan untuk membangun Wisata Edukasi seluas 1,5 hektare. Menteri Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, mengungkapkan Wisata Edukasi Desa Pejambon merupakan contoh bangkitnya perekonomian desa yang terpuruk akibat pandemi Covid-19. Wisata desa yang diresmikan pada September 2020 tersebut ditargetkan menarik 700 wisatawan per harinya dengan pemasukan sebesar Rp 1 miliar setahunnya. Ada 6 wahana yang tersedia, yaitu motor ATV, wahana kolam renang, halaman kolam renang, *flying fox*, museum pertanian, dan wisata tengah sawah (kemendesa.go.id). Fakta ini memperlihatkan bahwa ketika pembangunan desa dilaksanakan secara transparan maka akan mendapatkan kepercayaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat (jatim.antaranews.com).

Komitmen Kepala Desa Pejambon untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik terlihat dari melalui visinya, yaitu mewujudkan dan hadir lebih dekat melayani masyarakat menuju Pejambon yang bemartabat dan sejahtera. Artinya, pemerintah selalu ada ditengah-tengah masyarakat dalam segala hal dengan mengedepankan keterbukaan. Untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik yang sudah tertuang dalam visi, langkah awal yang dilakukan adalah memberikan pemahaman kepada aparatur desa tentang pentingnya pemerintahan yang terbuka. Adaptasi aparatur Desa Pejambon terhadap perubahan tidak

membutuhkan waktu yang lama, karena Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki sudah kompeten. Dapat diketahui dari tingkat pendidikan mereka yang minimal lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Langkah selanjutnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi. Upaya yang tidak kalah penting adalah komitmen pemerintah Desa Pejambon dalam mempercepat implementasi keterbukaan informasi publik berbasis TIK. Hal ini dapat dibuktikan dengan anggaran TIK yang terus meningkat setiap tahunnya.

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Desa Pejambon hingga sukses melaksanakan keterbukaan informasi publik. Terbukti banyak prestasi yang didapatkan mulai dari level kabupaten dan provinsi hingga nasional.

TINJAUAN PUSTAKA

Pemerintahan Terbuka

Sejak tahun 1950-an, istilah pemerintahan terbuka mulai banyak diperbincangkan terutama dalam ilmu politik. Saat itu, pemerintahan terbuka digunakan untuk membawa sisi politik yang lebih kuat dengan mengacu pada pengungkapan informasi pemerintah secara politik. Sehingga pemahaman utama dari konsep pemerintahan terbuka adalah transparansi informasi (Hood, 2006). Frasa ini pertama kali muncul dan diperdebatkan dengan mengarah pada pengesahan Undang-undang Kebebasan Informasi (Yu & Robinson, 2012).

Selanjutnya, sejak pertengahan abad ke-20 pemerintahan terbuka dalam menyediakan informasi publik adalah berdasarkan permintaan dan menjamin hak konstitusional warganya untuk mengetahui informasi tersebut. Perlu diketahui bahwa dorongan lain dari pemerintahan terbuka adalah, mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam memecahkan masalah publik. Hal ini membuktikan bahwa kehadiran pemerintahan terbuka memiliki komitmen yang kuat untuk mendorong terwujudnya partisipasi publik. Pemerintah terbuka saat ini sudah seharusnya digerakkan oleh informasi untuk meningkatkan partisipasi serta pemahaman masyarakat tentang kompleksitas dan pertimbangan kebijakan (Evans & Campos, 2013). Sehingga diperlukan transparansi dan keterlibatan masyarakat untuk membuka kolaborasi yang lebih luas dalam pemerintahan terbuka (Lee & Kwak, 2012).

Perlu diketahui bahwa pemerintahan terbuka tidak hanya merupakan kewajiban pemerintah dalam menyediakan akses informasi, dokumen, dan prosesnya kepada masyarakat (Lathrop & Ruma, 2010). Melainkan secara konseptual terkait dengan tuntutan transparansi dalam pemerintahan politik dan hubungan kolaboratif yang menjadi ciri inovasi teknologi kontemporer (Harrison, Pardo & Cook, 2012). Pemanfaatan TIK diperlukan dalam

pemerintahan terbuka untuk menunjukkan hubungan yang substansial (Parks, 1957), untuk mempermudah penyebaran informasi, transparansi sehingga mencegah korupsi (Dawes & Helbig, 2010), dan menyederhanakan birokrasi agar lebih efisien untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat (Alita, Supriyadi & Aditya, 2019). Jika hal ini terlaksana dengan baik, maka pemerintah akan dapat memberikan pelayanan untuk mencapai tujuan sosial yang lebih diinginkan (Harrison, *et al.*, 2012). Semua ini dilakukan tidak lain adalah untuk mewujudkan era baru pemerintahan terbuka.

Ciri-Ciri Pemerintahan Terbuka

Secara umum ciri-ciri pemerintahan terbuka adalah (1) dokumen pemerintah dapat diakses oleh publik baik secara langsung maupun tidak langsung, (2) informasi faktual yang berkaitan dengan kebijakan disediakan pemerintah dan publik dapat mengawasi berbagai kebijakan tersebut, (3) rapat atau pertemuan pemerintah yang sifatnya untuk kepentingan publik dilakukan secara terbuka, dan (4) pemerintah menyediakan konsultasi publik secara sistematis terkait kebijakan publik yang diambil (Dipopramono, 2017). Pendapat yang tidak jauh berbeda dijelaskan Pemimpin Masyarakat Sipil Tanzania Rakesh Rajani bahwa pemerintahan terbuka memiliki 4 ciri, yaitu (1) pemerintah yang bersedia mendengarkan secara langsung dan digital, (2) pemerintah menyediakan informasi untuk berbagai kegiatan yang dilakukan dan kegiatan yang tidak dilakukan, (3) perlindungan terhadap semua lapisan masyarakat, termasuk kaum minoritas, dan (4) dalam menentukan arah program dan kebijakan melibatkan partisipasi (INFID, 2016).

Dari pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintahan terbuka dapat diwujudkan jika pemerintah mengedepankan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

1. Partisipasi

Secara istilah, partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris, yakni *participation* yang berarti peran serta. Partisipasi adalah keikutsertaan atau peran serta secara aktif dan pro aktif dalam suatu aktifitas (Solekhan, 2014). Pengertian lain dari partisipasi yakni sebagai keterlibatan mental dan emosional seseorang dalam situasi kelompok yang mendorong untuk berkontribusi pada tujuan kelompok dan berbagi tanggung jawab (Davis & Newstrom dalam Mardiyanta, 2013). Sementara dalam proses pembangunan, partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan, antara lain pada kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang dilaksanakan pada masyarakat di tingkat lokal mendefinisikan partisipasi (Adisasmita, 2006). Oleh karena itu, setiap proses pembuatan kebijakan publik merupakan sesuatu hal yang penting sebagai cermin asas demokrasi. Partisipasi publik merupakan salah satu prinsip yang

memegang peranan penting yang harus diterapkan oleh pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Dwiyanto (2006).

United States Agency for International Development (USAID) menjelaskan bahwa penerapan partisipasi masyarakat memiliki 4 manfaat, yaitu (1) melakukan koreksi kebijakan daerah, seperti perencanaan dan alokasi anggaran, (2) untuk sumber memunculkan pendekatan dan program yang inventif dan inovatif, (3) dapat menjadi alat untuk menghilangkan kebijakan yang bersifat deskriminatif dan menciptakan program yang bersifat afirmatif, dan (4) untuk mengelola forum sebagai forum deliberatif agar dapat mengurangi potensi konflik (Solekhan, 2014)

2. Transparansi

Hadirnya transparansi akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan berbagai informasi secara bebas terkait proses dan pelaksanaan keputusan yang diambil. Artinya, dengan transparansi masyarakat tidak lagi kesulitan dalam mencari informasi yang dibutuhkan (Hidayat, 2007). Melalui transparansi informasi dapat tersedia dengan mudah, dapat diakses secara langsung dan mudah (Nugroho, 2003). Ada tiga indikator yang dapat dijadikan acuan untuk mengukur tingkat transparansi pemerintahan, yaitu (1) keterbukaan pelayanan publik yang meliputi biaya, waktu, dan dipublikasikan secara terbuka prosedur yang harus ditempuh, agar berbagai pihak yang berkepentingan dapat dengan mudah mengetahuinya, serta adanya penjelasan, (2) pengguna dan pemangku kepentingan mudah memahami peraturan dan prosedur pelayanan. Maka dari itu, peraturan dan prosedur tersebut harus bersifat langsung, sederhana, dan mudah diaplikasikan untuk meminimalisir adanya perbedaan dalam interpretasi, dan (3) berbagai informasi tentang aspek penyelenggaraan pelayanan publik dapat diperoleh dengan mudah. Artinya, informasi harus bebas dan tersedia. Tersedianya informasi bagi publik tentang pemerintahan dan informasi-informasi tersebut dijamin dapat diakses secara akurat dan memadai (Dwiyanto, 2006). Sehingga transparansi merupakan prinsip untuk mendapatkan kebebasan atau akses informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pembuatan kebijakan, pelaksanaan, dan hasil yang telah dicapai (Krina, 2003)

3. Akuntabilitas

Istilah pertanggungjawaban dipergunakan untuk menerjemahkan beberapa istilah dalam bahasa Inggris yaitu *responsibility*, *accountability*, *liability*, *responsivitas*, yang masing-masing mempunyai pengertian tersendiri. Alasan mengapa organisasi pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat. Organisasi pemerintah dibuat oleh publik dan untuk kepentingan publik, sehingga harus memberikan pertanggungjawaban atas segala

tindakan dan kebijakannya kepada publik (Widodo, 2002). Dalam konteks birokrasi, akuntabilitas merupakan kewajiban aparatur pemerintah untuk mempertanggungjawabkan atas semua kebijakan dan tindakan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Nisjar dalam Rakhmat, 2018). Lebih detailnya Dwiyanto (2006) mengatakan bahwa Akuntabilitas adalah suatu derajat yang menunjukkan besarnya tanggung jawab aparat atas kebijakan maupun proses pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah. Menurut Schacter dalam Rakhmat (2018) akuntabilitas memiliki dua, yakni (1) tujuan politik adalah suatu upaya untuk memperkecil penyalahgunaan kekuasaan, dan (2) tujuan operasional adalah suatu upaya menjamin pemerintah dalam melakukan kegiatan dengan efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif memberikan informasi atau gambaran dengan detail dan akurat (Neuman (2015). Pendekatan kualitatif ialah menggali dan memahami permasalahan sosial yang mencakup prosedur dan pertanyaan yang muncul, data yang umumnya dikumpulkan, analisis data dilakukan secara induktif untuk membangun tema dari tema yang bersifat khusus ke umum (Creswell, 2009). Penelitian ini dilakukan di Desa Pejambon karena berhasil mewujudkan keterbukaan informasi publik dengan prestasi yang diraih mulai tingkat kabupaten, provinsi, bahkan nasional.

Teknik Penentuan Informan

Teknik *purposive sampling* digunakan untuk menentukan informan dalam penelitian ini. Teknik ini banyak dipakai dalam riset eksplorasi (penelitian lapangan), yaitu dengan menggunakan penilaian ahli yang kompeten (Neuman, 2015). Artinya, bahwa teknik penentuan informan dipertimbangkan terlebih dahulu bukan dengan cara acak, sehingga pemilihan informan dilakukan sesuai kriteria yang relevan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini perangkat Desa Pejambon dipilih sebagai informan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara yaitu (1) observasi, adalah salah satu alat penting dalam pengumpulan data penelitian adalah observasi. Indera peneliti dalam observasi digunakan untuk memperhatikan setiap fenomena yang terjadi di lapangan. Sementara perangkat atau alat bantu sangat dibutuhkan peneliti untuk merekamnya (Angrosino, 2007). Penelitian ini memilih observasi jenis non-partisipan. Sehingga peneliti berperan sebagai *outsider* dari kelompok yang diteliti, mengamati dan

mencatat fenomena yang terjadi di lapangan tanpa terlibat secara langsung (dari kejauhan); (2) wawancara, adalah bertemunya dua orang dengan tujuan berbagi informasi dan gagasan melalui pertanyaan dan jawaban, hasilnya berupa komunikasi dan konstruksi terkait tema tertentu (Esterberg, 2002). Peneliti dapat melakukan wawancara dengan pertanyaan terbuka secara langsung (berhadapan-hadapan) atau menggunakan fasilitas lain, seperti telepon (Creswell, 2017); dan (3) dokumentasi, adalah studi dokumen dalam penelitian dijadikan sebagai pelengkap. Selama penelitian berlangsung, peneliti menghimpun berbagai dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian (Creswell, 2017).

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik triangulasi digunakan untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini. Triangulasi merupakan salah satu cara terbaik untuk memperoleh hasil data yang terpercaya dan akurat. Karena ketika mengumpulkan data, berbagai perbedaan pada konstruksi kenyataan berada dalam konteks suatu studi sehingga dapat diminimalisir, atau bahkan dihilangkan. Manfaat lainnya adalah peneliti dapat memeriksa kembali temuan dan membandingkan dengan berbagai sumber, teori, dan metode. Triangulasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Perbandingan ini dilakukan dengan hasil pengamatan tentang kondisi atau peristiwa yang terjadi di lapangan dengan jawaban hasil wawancara dari informan. Selanjutnya, membandingkan data dari dokumen tertulis dengan hasil wawancara. Peneliti membandingkan informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan dokumen-dokumen pendukung. Langkah terakhir adalah membandingkan data hasil wawancara dari berbagai informan. Informasi yang diperoleh dari satu informan yang telah ditentukan akan dibandingkan dengan informan lainnya yang memiliki kesamaan topik.

Teknik Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan *interactive model* yaitu (1) reduksi data, adalah langkah awal yang perlu dilakukan peneliti yakni mereduksi data. Reduksi data merupakan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mengubah data “mentah” yang didapat selama berada di lapangan. Data yang berasal dari lapangan ini kemudian direduksi untuk menyediakan informasi atau gambaran yang lebih rinci sehingga dapat mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data; (2) menyajikan data, adalah langkah kedua dari aktivitas analisis data adalah penyajian data. Penyajian data adalah gabungan informasi sistematis yang memungkinkan pengambilan tindakan dan kesimpulan. Penyajian data dapat berbentuk bagan, teks narasi, diagram alur (*flow chart*), dan hubungan antar kategori, dan (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi, adalah langkah selanjutnya

dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi data dilakukan berdasarkan temuan. Pada tahap ini kesimpulan awal yang diberikan sifatnya masih sementara, jika peneliti menemukan fakta-fakta baru dan kuat pada bagian pengumpulan data maka kesimpulan dapat berubah. Akan tetapi, jika kesimpulan yang diberikan pada fase awal ini sudah didukung oleh berbagai bukti yang konsisten dan kuat maka kesimpulan dapat dipercaya ((Miles, Huberman, & Saldana, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi

Sejak 2012, pemerintah Desa Pejambon yang dipimpin Abd Rohkman mulai konsisten mendekatkan diri kepada masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari visi Desa Pejambon, yaitu “mewujudkan dan hadir lebih dekat melayani masyarakat menuju Pejambon yang bermartabat dan sejahtera”. Arti kata “melayani” adalah dalam hal pelayanan masyarakat pemerintah berusaha selalau prima dan mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi baik pelayanan administrasi dan sosial lainnya. Untuk melaksanakan visi tersebut apalagi untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik bukan sesuatu hal yang mudah, sehingga pemerintah Desa Pejambon sadar bahwa keterlibatan masyarakat memegang peran penting. Adapun upaya pemerintah Desa Pejambon untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan beberapa cara, antara lain Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Kegiatan ini diselenggarakan di balai desa setiap tahunnya untuk menggali aspirasi masyarakat. Tahapan Musrenbang Desa diawali dari penggalian gagasan dan aspirasi tingkat RT/RW dan lembaga Desa. Adanya kesempatan menyampaikan pendapat dalam kegiatan tersebut maka dapat dipastikan bahwa demokrasi berjalan dengan baik (Dwiyanto, 2006). Berikut ini merupakan contoh realisasi Musrenbang Desa Pejambon.



Gambar 2. Musrenbang Desa Pejambon, 2017 diakses 29 Oktober 2020

Partisipasi masyarakat Desa Pejambon di Musrenbang Desa sangat tinggi. Contohnya, pada Musrenbang Desa tahun 2017 yang dihadiri 97 orang dari 22 lembaga dan kelompok Desa. Hal ini disebabkan karena masyarakat menyadari bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu sarana berkontribusi untuk tujuan pembangunan desa yang lebih baik. Musrenbang Desa menjadi fasilitas yang tepat untuk menggali aspirasi karena dalam forum ini melibatkan mental dan emosional seseorang pada tujuan kelompok dan berbagi tanggung jawab (Davis & Newstrom dalam Mardiyanta, 2013). Perlu diketahui bahwa Musrenbang Desa merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah desa terhadap implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Sementara itu, partisipasi pada Musrenbang Desa merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan, yaitu kegiatan perencanaan (Adisasmita, 2006).

Hasil Musrenbang Desa pada aspek keterbukaan pemerintah dapat dilihat dari selalu tersedianya anggaran dana untuk menunjang keterbukaan informasi publik berbasis TIK. Pada tahun 2018, alokasi dana yang diberikan kepada sistem informasi pembangunan desa sebesar Rp. 20.000.000; penyelenggaraan dan jaringan komunikasi/pembuatan instalasi serta informasi desa setempat mencakup wifi berlangganan Rp. 600.000 dan sewa hosting Rp. 1.750.000 kemudian di 2019, pengembangan desa sistem informasi mencakup operasional Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebesar Rp. 1.663.000 sewa hosting Rp. 1.600.000 wifi berlangganan Rp. 4.800.000.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah Desa Pejambon untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah dengan menyelenggarakan Diskusi Publik yang dikemas dalam 2 model, yaitu forum rembug desa dan jandom bareng kepala desa. Forum rembug desa adalah media interaksi antara pemerintah Desa Pejambon dengan masyarakat untuk saling menginformasikan sekaligus sebagai media pengawasan masyarakat kepada kebijakan pemerintah desa. Kegiatan ini diadakan 2 kali dalam satu bulan, yaitu tanggal 1 dan 15. Forum rembug desa ini digerakan oleh Tim Program Kesejahteraan Keluarga (PKK). Selanjutnya, jandom bareng kepala adalah media inovasi tatap muka atau dialog yang mana penyelenggaranya adalah Lembaga Kebudayaan Desa. Kegiatan yang diadakan 40 hari sekali ini dikemas secara modern seperti tayangan di televisi, dengan tujuan agar masyarakat tidak mudah bosan dan terhibur ketika menyampaikan aspirasi. Dengan cara seperti ini, harapannya banyak masyarakat yang datang diacara diskusi publik.

Selanjutnya, menyediakan layanan informasi melalui SMS Center Desa dan Group WhatsApp. SMS Center merupakan layanan pemerintah Desa Pejambon kepada masyarakat melalui Handphone (+62822-9815-6979). Sarana ini dipilih karena setiap kepala Keluarga

mempunyai Handphone sehingga dengan adanya SMS Center, masyarakat akan dengan mudah menyampaikan aspirasi, saran dan kritik dimana pun tempatnya. Selain melalui SMS, masyarakat juga bisa menyampaikan aspirasi dan melakukan pengawasan melalui Group WhatsApp. Grup ini terdiri dari perangkat desa, lembaga desa, dan masyarakat yang beranggotakan lebih dari 300.

Transparansi

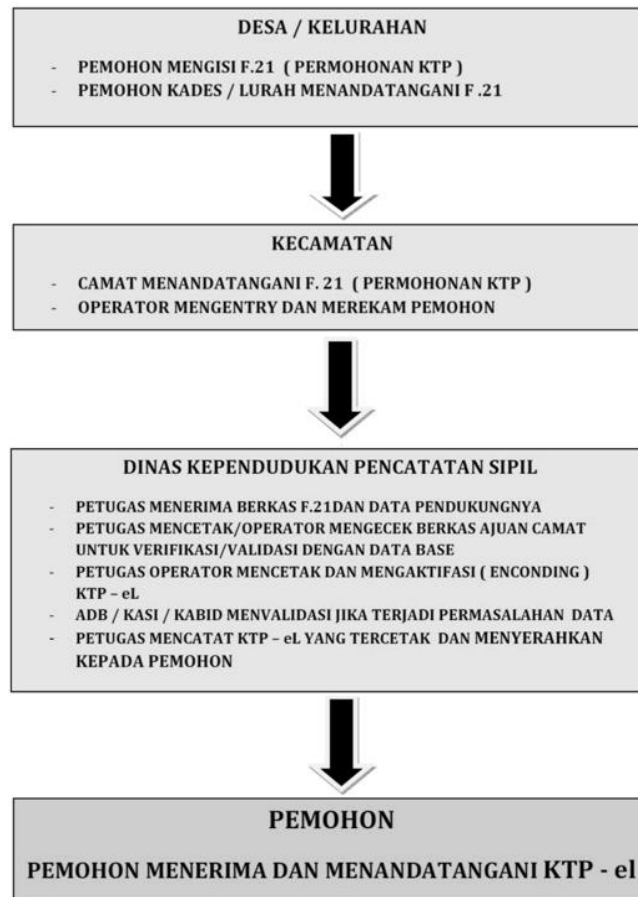
Transparansi di pemerintah Desa Pejambon dilakukan dengan dua metode, yaitu konvensional dan berbasis TIK. Metode konvensional yang dimaksud seperti memberikan informasi desa melalui baliho. Hal ini perlu dilakukan untuk memfasilitasi masyarakat yang tidak bisa atau belum menguasai TIK dengan baik. Kemudian metode berbasis TIK (website) yang dapat diakses di alamat: pejambon-bjn.desa.id. Upaya ini untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin mendapat informasi publik yang disediakan oleh pemerintah Desa Pejambon tanpa harus datang ke balai desa. Keuntungan dari cara ini adalah informasi dapat diakses dimanapun dan kapanpun tanpa dibatasi ruang dan waktu, sehingga masyarakat tidak kesulitan untuk mendapatkan informasi karena dapat diakses secara langsung (Hidayat, 2007; Nugroho, 2003). Berikut ini adalah website pemerintah Desa Pejambon.



Gambar 3. Website Desa Pejambon diakses 29 Oktober 2020

Dalam website tersebut tersedia berbagai informasi publik terkait penyelenggaraan pemerintah meliputi profil, lembaga, layanan, regulasi, potensi desa, rencana kerja, dan laporan realisasi anggaran. Ini berarti pemerintah Desa Pejambon telah berhasil menyediakan

informasi mulai dari pembuatan kebijakan, pelaksanaan, dan hasil yang telah dicapai (Krina, 2003; Dwiyanto, 2006). Selain itu, informasi pelayanan publik juga dipublikasikan dengan prosedur yang mudah dipahami oleh masyarakat (Dwiyanto, 2006), contohnya pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP).



**Gambar 4. Alur Pelayanan KTP
diakses 29 Oktober 2020**

Akuntabilitas

Organisasi pemerintah tidak terkecuali pemerintah Desa Pejambon diharuskan bertanggung jawab kepada masyarakat atas proses penyelenggaraan pemerintahan (Widodo, 2002; Dwiyanto, 2005). Salah satu tanggung jawab tersebut adalah transparansi APBDes. Pemerintah Desa Pejambon sudah melakukan transparansi penggunaan APBDes dengan baik yaitu dilakukan dua kali dalam satu tahun. Sebelum dipublikasikan pada baliho dan website, pihak desa melakukan evaluasi melalui forum APBDes yang dipimpin oleh kepala desa. Dari evaluasi dapat diketahui sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program desa. Selain itu, forum ini dapat menarik masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan program.

Sementara itu, transparansi APBDes melalui website sudah dilakukan pemerintah

Desa Pejambon sejak 2015. Dengan dipublikasi secara online, masyarakat mudah mengakses laporan pertanggungjawaban dari pihak desa. Sehingga penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisir karena adanya pengawasan dari semua stakeholder (masyarakat, pemerintah desa sendiri, pihak kecamatan, kabupaten hingga pemerintah pusat). Selain itu, transparansi APBDes melalui website juga membantu pemerintah bertindak secara efektif dan efisien (Schacter dalam Rakhmat, 2018). Karena pemerintah Desa Pejambon dapat dengan mudah mengetahui program kerja yang sudah berhasil dan yang belum terlaksana secara maksimal. Program yang berhasil bisa menjadi acuan untuk program selanjutnya, sedangkan yang belum terlaksana dengan maksimal bisa dicarikan solusinya secara baik dan tepat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah Desa Pejambon berhasil mewujudkan keterbukaan informasi publik karena melaksanakan ketiga prinsip *Good Governance* dengan baik. Upaya yang dilakukan pemerintah Desa Pejambon untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dilakukan secara konvensional (misalnya, Musrenbang Desa dan diskusi publik) dan berbasis TIK (melalui SMS Center, dan Grup WhatsApp). Upaya yang sama dilakukan pada dimensi transparansi dan akuntabilitas, yaitu konvensional melalui baliho sedangkan berbasis TIK lebih menekankan pada pemanfaatan website desa. Sehingga keberhasilan pemerintah Desa Pejambon dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik tersebut dapat dijadikan contoh bagi pemerintah desa lainnya di Kabupaten Bojonegoro dan Indonesia mengingat masih banyak desa yang tertutup.

Penelitian ini masih bersifat deskriptif sehingga belum mampu menganalisis permasalahan secara mendalam. Selain itu, ciri-ciri umum pemerintahan terbuka yang digunakan hanya fokus pada partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode lain dan menggunakan ciri pemerintahan terbuka yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Alita, E.S., Supriyadi., dan Aditya, M.T.P. (2019). Sistem Layanan Informasi, Pengaduan Masyarakat Berbasis Elektronik (*E-Service*) Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Dan Keterbukaan Informasi Pemerintah Kabupaten Pacitan. *Public Administration Journal of Research*, 1(4), 335-348.
- Angrosino, M.V. (2007). *Naturalistic Observation*. CA: Left Coast Press Inc.
- Bappenas & OGI. (2016). Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah 2016-2017. Diakses Oktober 29, 2020, dari

- https://issuu.com/opengovernmentindonesia/docs/19122016_rencana_aksi_keterbukaa_n_p.
- Berita Bojonegoro. (2016). Dalam Tiga Tahun Baru Ada 90 Website Desa. Diakses Oktober 29, 2020, dari <https://beritabojonegoro.com/read/6881-dalam-tiga-tahun-baru-ada-90-website-desa.html>.
- Berita Bojonegoro. 2017. 105. Desa di Bojonegoro Memiliki Webdes. Diakses Oktober 29, 2020, dari <https://beritabojonegoro.com/read/7848-105-desa-di-bojonegoro-memilikiwebdes.html>.
- Creswell, J.W. (2009). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. (2015). *Qualitative Research & Design Research*. Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design: Qualitative, quantitative, and Mixed Edition 4-translation method approach*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Dawes, S.S. & Helbig, N. (2010). Information Strategies for Open Government: Challenges and Prospects for Deriving Public Value from Government Transparency. Presented at the 9th International Federation for Information Processing (IFIP) WG 8.5 International Conference (EGOV 2010), Lausanne, Switzerland, 29 August–2 September.
- Desa Pejambon. (2018). Prestasi Desa Pejambon Sejak Tahun 2013-2018. Diakses Oktober 29, 2020 dari <https://pejambon-bjn.desa.id/prestasi-des/>.
- Dipopramono, A., 2017. *Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik (Panduan Lengkap Memahami Open Government dan Keterbukaan Informasi Publik, serta Praktik Sengketa Informasi Publik)*. Jakarta Selatan: renebook.
- Diskominfo Kabupaten Bojonegoro. (2016). Menuju Gerbang Dunia Pemerintahan Terbuka Rakyat Bahagia. Diakses Oktober 29, 2020, dari <http://repo.databojonegoro.com/Materi/OGP.pdf>.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Esterberg, K.G. (2002). *Qualitative Methods Ins Social Research*. New York: Mc Graw Hill.
- Evans, A.M. & Campos, A. (2013). Open Government Initiatives: Challenges of Citizen Participation. *Journal of Policy Analysis and Management*, 32(1), 172-203.
- Handiyono, V.J. & Lutfi, A. (2020). Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 (Desa Tambun dan Desa Segarajaya). *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(2), 101-119.
- Harrison, T.M., Pardo, T.A. & Cook, M. (2012). Creating Open Government Ecosystems: A Research and Development Agenda. *Future Internet*, 4, 900-928.
- Harrison, T.M., Guerrero, S., Burke, G.B., Cook, M., Cresswell, A., Helbig, N. & Pardo, T.A. (2012). Open overnment and E-government: Democratic Challenges from a Public Value Perspective. *Information Polity*, 17, 83-97.
- Hidayat, M.L. (2007). *Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hood, H.D. (2006). *Transparency: The Key to Better Governance*. Oxford, England: Oxford University Press.
- IDFOS. (2017). Keterbukaan Belum Sampai ke Desa. Diakses Oktober 29, 2020 dari <https://www.idfos.or.id/keterbukaan-belum-sampai-ke-des/>.
- INFID. (2016). Bojonegoro Inspirasi Untuk Negeri. Diakses Oktober 29, 2020 dari http://repo.databojonegoro.com/Materi/Bojonegoro_Inspirasi_untuk_Negeri.pdf.
- Jatim Antaranews. (2018). Pejambon Bojonegoro Manfaatkan Hibah Bank Dunia Bangun Taman Wisata. Diakses Oktober 29, 2020 dari

- <https://jatim.antaranews.com/berita/267173/pejambon-bojonegoro-manfaatkan-hibah-bank-dunia-bangun-taman-wisata>.
- Kanal Bojonegoro. (2018). Desa Pejambon Wakili Jatim di Lomba Desa Nasional. Diakses Oktober 29, 2020 dari <https://www.kanalbojonegoro.com/desa-pejambon-wakilijetim-di-lomba-desa-nasional/>.
- Kemendes. (2020). Gus Menteri Resmikan Desa Wisata di Bojonegoro. Diakses Oktober 29, 2020 dari <https://www.kemendes.go.id/berita/view/detil/3431/gus-menteri-resmikan-desa-wisata-di-bojonegoro>.
- KIP Jawa Timur. (2017). PPID Award 2017, Dorong Keterbukaan Informasi Hingga ke Desa. Diakses Oktober 29, 2020 dari <https://kip.jatimprov.go.id/news/read/2017/12/18/186/ppid-award-2017dorong-keterbukaan-informasi-hingga-ke-desa.html>.
- Kompas. (2014). Nawa Cita, 9 Agenda Prioritas Jokowi-JK. Diakses Oktober 29, 2020, dari <https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK>.
- Krina, P. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jakarta.
- Kusnan. (2020). *Website Quality dalam Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintahan Tingkat Desa (Studi Desa Pejambon Kabupaten Bojonegoro)*. Tesis. Universitas Airlangga.
- Lokadata. (2020). Anggaran Dana Desa, 2015-2020. Diakses Oktober 29, 2020 dari <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/anggaran-dana-desa-2015-2020-1565947501>.
- Lathrop, D. & Ruma, L. (Eds.). (2010). *Open government: Collaboration, Transparency, and Participation in Practice*. Sebastopol, CA: O'Reilly Media.
- Lee, G. & Kwak, Y.H. (2012). An Open Government Maturity Model for Social Media-Based Public Engagement. *Government Information Quarterly*, 29, 492-503.
- Mardiyanta, A. (2013). State of the Art: Konsep Partisipasi dalam Ilmu Administrasi Publik. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*, 26(4), 227-242.
- Media Indonesia. (2020). BNNP: 473 Kades Telah Terseret Korupsi Dana Desa. Diakses Oktober 29, 2020 dari <https://mediaindonesia.com/read/detail/292266-bnnp-473-kades-telah-terseret-korupsi-dana-desa>.
- Miles, M.B., Huberman, A.M. & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Penerjemah Tjetjep Rohindi Rohidi. Jakarta: UI-Press.
- Neuman, W.L. (2015). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Edisi 7*. Penerjemah: Edina T. Sofia. Jakarta: PT. Indeks.
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Rakhmat. (2018). *Administrasi dan Akuntabilitas Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Simarmata, J. (2010). *Rekayasa Perangkat Lunak*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Solekhan. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang Setara Press.
- Wiratmo, L.B., Irfan, N. & Kuwatono. (2017). Website Pemerintah Daerah sebagai Sarana Online Public Relations. *Jurnal ASPIKOM*, 3(2), 326-339.
- Widodo, J. (2002). *Good Governance Telaah Pada Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Yu, H., & Robinson, D.G. (2012). The New Ambiguity of Open Government. *UCLA Law Review Discourse*, 59, 178-230.